

PENGARUH ANGGARAN PERTAHANAN DAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER (Studi di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan)

Muhtar Rifai¹⁾, Ansar Tutu²⁾, Mulyani³⁾, Andi Sunra⁴⁾, Kasih Prihatoro⁵⁾
Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: muhtarrefai14@gmail.com

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article
Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v2i1.43](https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.43)

Abstract

National defense is a government function that is carried out through a universal defense system. Defense is functioned to deal with urgent threats to national security and defense not only limited to space and time, but also to the strategic environment at the global, regional, and national levels. The conditions faced by the COVID-19 pandemic have weakened several sectors. Through the program of military operations other than war (OMSP), the Indonesian National Armed Forces together with related institutions are trying to strengthen each other in actions to stabilize the country. For this reason, it is very important to prepare the defense budget in optimizing personnel and material capabilities. This research is focused on knowing the effect of the defense budget and minimum essential force in facing non-military threats partially or simultaneously. This research method uses a survey with data collection through questionnaires. This research is associative quantitative research which aims to find the influence or relationship between variables. The sample used is 76 respondents. Data processing using SPSS 21.0 analysis for the data quality test process, classical assumption test, and multiple linear regression test. The results achieved in this study include, (1) the defense budget and the minimum essential force simultaneously have a positive and significant effect in dealing with non-military threats, (2) the budget has a positive and significant effect in dealing with non-military threats, (3) the minimum essential force has an effect on positive and significant in dealing with non-military threats.

Keywords: *Defense Budget, Minimum Essential Force, Non-Military Threats*

Abstrak

Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan difungsikan menghadapi bentuk ancaman yang mendesak terhadap keamanan maupun pertahanan negara tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu, namun juga pada lingkungan strategis dalam tataran global, regional, maupun nasional. Kondisi yang dihadapkan dalam pandemi covid-19 membuat beberapa sektor mengalami pelemahan. Melalui program operasi militer selain perang (OMSP), Tentara Nasional Indonesia bersama lembaga-lembaga terkait berusaha saling menguatkan dalam tindakan untuk stabilisasi negara. Untuk itu penyiapan anggaran pertahanan dalam optimalisasi kemampuan personel dan materiil menjadi sangat penting dilaksanakan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh anggaran pertahanan dan *minimum essential force* dalam menghadapi ancaman non militer secara parsial maupun simultan. Metode penelitian ini menggunakan survey dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang mana bertujuan untuk mencari pengaruh atau hubungan antar variabel. Sampel yang digunakan adalah 76 responden. Pengolahan data menggunakan analisis SPSS 21.0 untuk proses uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini meliputi, (1) anggaran pertahanan dan *minimum essential force* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan dalam menghadapi ancaman non militer, (2) anggaran berpengaruh positif dan signifikan

dalam menghadapi ancaman non militer, (3) *minimum essential force* berpengaruh positif dan signifikan dalam menghadapi ancaman non militer.

Kata Kunci: Anggaran Pertahanan, *Minimum Essential Force*, Ancaman Non Militer

1. PENDAHULUAN

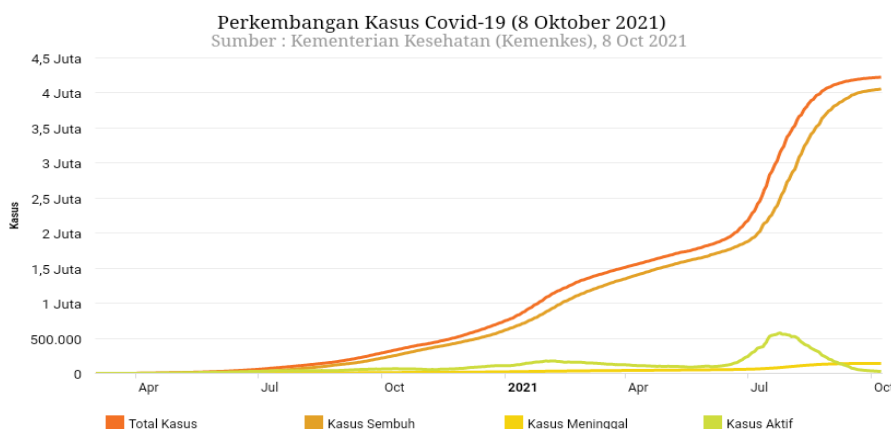
1.1 Latar Belakang

Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya, dan sarana prasarana nasional yang dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. TNI sebagai komponen sekaligus kekuatan utama berkewajiban bertanggungjawab penuh dalam merespon berbagai ancaman yang mengganggu keselamatan bangsa. Menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah dinamis, berdampak pada upaya restrukturisasi politik dan keamanan negara-negara dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi yang semakin deras, perubahan konflik dari *inter-state* menjadi *intra-state*, arus globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, universalisasi HAM, serta ancaman yang semakin kompleks membuat masing-masing negara menata ulang sistem pertahanannya (Mengko, 2015).

Ancaman yang mendesak terhadap negara terus berkembang baik berasal dalam tataran global, regional, maupun nasional membuat negara mengadopsi berbagai teknologi terbaru bagi kepentingan militer yang ditujukan untuk mempertahankan diri dari ancaman militer maupun non militer, serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman yang timbul dari berbagai aktor nasional maupun internasional.

Arus globalisasi yang begitu kompleks dan sangat pesat melewati batas-batas tanpa disadari membawa isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman non militer. Hal ini tentu harus diwaspadai. Secara dinamika, sisi non militer dominan untuk menekan dan mengancam negara lain dalam memuluskan ambisi suatu negara. Sebagai upaya antisipasi, sinergi dalam membangun dan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman nonmiliter harus dijalankan dengan baik. Aspek yang harus ditata dalam menghadapi ancaman nonmiliter adalah peraturan perundang-undangan, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, intelijen dituntut untuk melakukan deteksi dan cegah dini serta deteksi aksi untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks (Dewan Pertimbangan Presiden RI, 2017).

Kondisi dunia terkini termasuk Indonesia disibukkan dalam menghadapi wabah yang dampaknya sangat luas. Penyebaran wabah covid-19 yang meluas hingga menjadi pandemi, merupakan ancaman nonmiliter selain ancaman nonmiliter lain yang tertulis dalam Buku Putih Pertahanan tersebut seperti: bencana alam, perubahan iklim, aksi terorisme, ketahanan pangan, air, dan energi (Luthfi, 2020). Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 (Gorbalenya, 2020). Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Adapun perkembangan kasusnya di Indonesia saat ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber : databoks.katadata.co.id

Berdasarkan gambar grafik di atas, hingga 08 Oktober 2021 kasus covid-19 di Indonesia bertambah 1.384 kasus. Sehingga, total kasusnya menjadi 4.225.871 kasus dengan rincian sebanyak 4.057.760 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (96.02%), dan 142.560 orang meninggal dunia (3.37%), sementara sisanya masih menjalani perawatan.

Peristiwa ini menjadi sebuah isu global yang sangat menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Di Indonesia hal ini bukan hanya direspon sebagai isu global saja, namun juga sebagai isu regional dan nasional. Mobilitas yang sangat tinggi negara ASEAN maupun negara Asia Timur membuat mobilisasi virus juga beredar sangat cepat. Untuk itu, covid-19 bukan hanya masalah ancaman kesehatan dan masalah Tiongkok saja, namun telah menjadi ancaman keamanan bagi negara dan masyarakat dunia. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting untuk masyarakat dunia yang saling bergantung (*interdependent*) dalam upaya penanggulangan bersama. Hal ini pun telah diakui dunia bahwa seluruh negara mengalami kondisi pelemahan kekuatan (*weak state*) (Sariwaty S dan Rahmawati, 2020).

Covid-19 menjadi wabah penyakit yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bernegara. Pemberlakuan pembatasan mobilisasi di masing-masing daerah membuat sektor ekonomi terancam. Beberapa isu yang menjadi efek dalam sektor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan daya beli masyarakat rendah, timbul PHK dimana-mana yang membuat banyak pengangguran, dan beban APBN semakin tinggi. Selain itu juga menimbulkan ancaman pada sektor fiskal dan moneter yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional (Supandi, 2020). Bagi masyarakat yang terdampak PHK maupun pembatasan sosial, pengangguran menjadi isu utama dan paling menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik mencatat 1.62 juta orang pengangguran karena covid-19, 0.65 juta orang bukan angkatan kerja karena covid-19, 1.11 juta orang sementara tidak bekerja karena covid-19, dan 15.72 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja. Berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka periode februari 2020 hingga februari 2021:



Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Sumber : www.bps.go.id

Data di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal periode februari 2020 hingga februari 2021. Diketahui bahwa karena dampak covid-19 yang muncul awal tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia terjadi peningkatan cukup besar. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dominan persentase laki-laki, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal jauh lebih tinggi orang yang tinggal di perkotaan dibanding tinggal di desa.

Perihal kasus pandemi covid-19 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan terhadap ancaman pandemi covid-19.

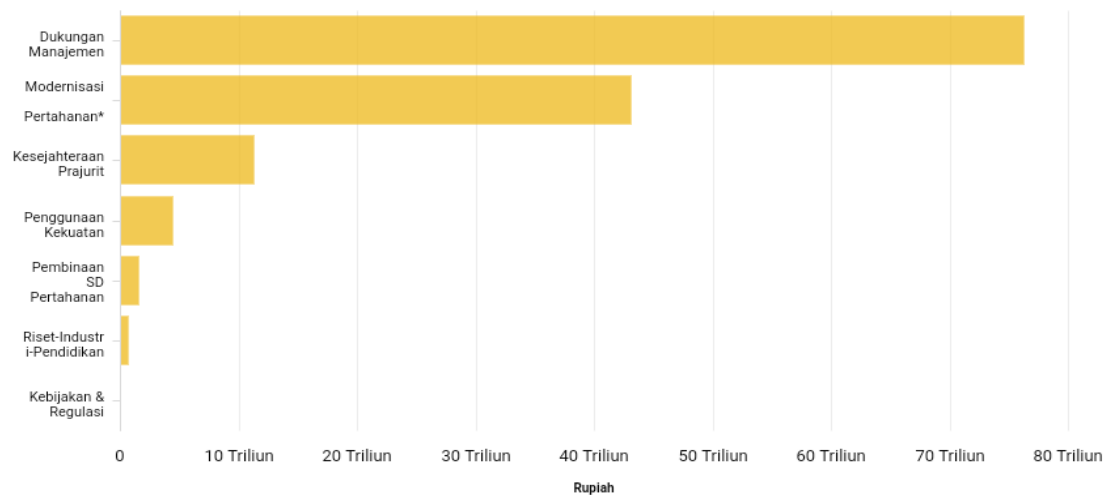
Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020 dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan khususnya TNI memiliki peran, tugas, dan fungsi terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam dimensi non militer, peran TNI difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP) yang meliputi pencegahan perang, penyelesaian konflik, perdamaian, dan mendukung pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis dalam negeri. operasi militer selain perang (OMSP) dalam tugasnya tidak melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan, namun lebih mengutamakan pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Dalam OMSP, kekuatan militer bersinergi dengan lembaga/organisasi lain, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik dan keagamaan.

Menghadapi bentuk ancaman non militer berhubungan erat dengan peran serta TNI. TNI sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman non militer memang tidak dapat begitu saja mengabaikan tugas sebagai komponen utama. Namun, secara kemampuan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh TNI baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas maupun materiil sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan seperti saat pandemi covid-19 ini.

Dalam upaya menguatkan pertahanan negara menghadapi ancaman non militer, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan personil menjadi sangat diperlukan. Namun, harus tetap sesuai proporsi serta koridor tugas pokok dan fungsi. Penguatan penyelenggaraan pertahanan negara tentu membutuhkan anggaran cukup besar dari pemerintah, meskipun secara umum anggaran yang tersedia hari ini belum dapat mencukupi pemetaan kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan dalam menunjang keberadaan produk pertahanan baik SDM maupun alutsista, serta dan kebutuhan lainnya.

Anggaran pertahanan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk segala macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara dan bangsa. Adapun besaran anggaran tersebut bergantung pada kemampuan suatu negara dan skala prioritas dalam pembangunan (Supandi, 2019). Anggaran pertahanan dibagi menjadi tujuh program yang meliputi gambar di bawah:

Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan Berdasarkan Program (2021)



Gambar 1.3 Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan Berdasarkan Program 2021

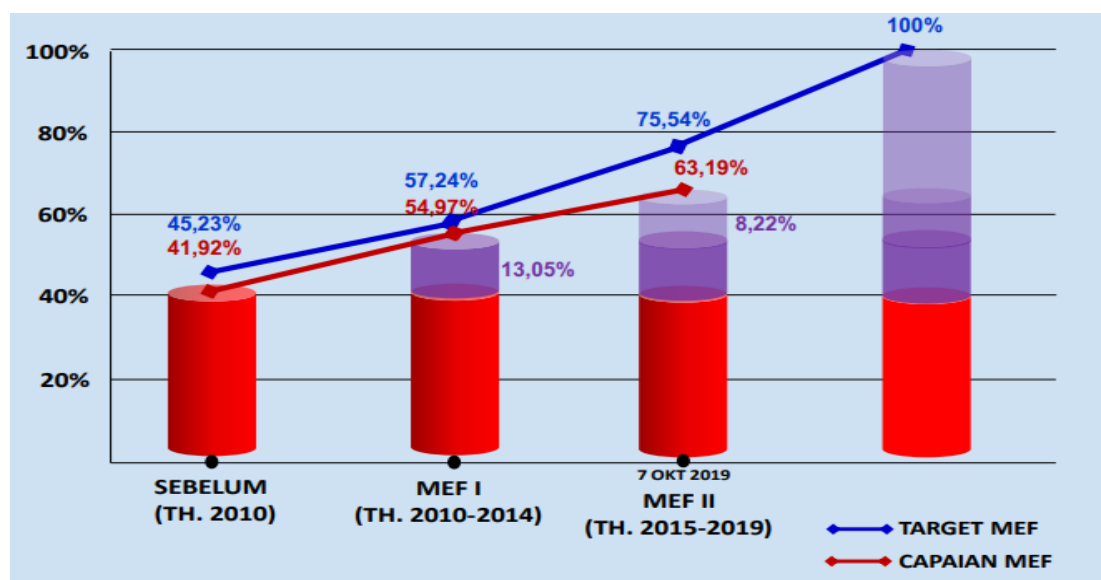
Sumber : databoks.katadata.co.id

Jatah anggaran sebesar Rp 137,3 triliun digunakan untuk menjalankan program-program Kementerian Pertahanan. Adapun rinciannya mayoritas anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp 76,3 triliun; program modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan mendapat sokongan anggaran hingga Rp 43,1 triliun; program kesejahteraan prajurit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11,2 triliun; program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun; program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp 663,5 miliar; sedangkan anggaran terkecil untuk program kebijakan dan regulasi pertahanan yang sebesar Rp 22,5 miliar.

Penggunaan anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer diarahkan pada kebijakan pertahanan negara dalam lingkup pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) prajurit TNI. Oleh karena itu, program pembinaan sumber daya pertahanan serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit menjadi fokus penyerapan anggaran untuk menghadapi ancaman pandemi covid-19.

Selain program di atas, pemenuhan *minimum essential force* (MEF) yang terintegrasi dan berkesinambungan dirasa mampu menopang kepentingan pertahanan. Pertahanan yang kuat dibangun atas kualitas SDM berkompeten tinggi, profesional yang didukung alat utama sistem persenjataan modern untuk mencapai standar penangkalan. Lain halnya pertahanan non militer yang mana dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional pada bidang multidimensional.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan program prioritas bidang pertahanan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan (Permenhan Nomor 19 Tahun 2012). Adapun capaian fisik MEF bidang alutsista sebagai berikut:



Gambar 1.4 Capaian Aspek Fisik Alutsista MEF 2010-2024

Sumber : Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan, (2019).

Pemenuhan MEF tahap I hanya mencapai 54,97 persen dari target 57,24 persen yang diinginkan. Pada bulan Oktober 2019, pencapaian MEF baru mencapai 63,19 persen daritarget MEF fase II sebesar 75,54 persen. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat, serta penyiapan pasukan siaga yang utamanya dimaksudkan untuk penanganan bencana alam serta tugas misi perdamaian.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, masalah yang akan diteliti kami batasi pada masing-masing variabel sebagai berikut:

- Variabel anggaran pertahanan dibatasi pada program pembinaan sumber daya pertahanan serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
- Variabel *minimum essential force* (MEF) dibatasi pada pengadaan alutsista.
- Variabel ancaman non militer dibatasi pada dampak pengangguran yang ditimbulkan adanya pandemi covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh anggaran pertahanan dan *minimum essential force* secara simultan dalam menghadapi ancaman non militer ?
- b. Bagaimana pengaruh anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer ?
- c. Bagaimana pengaruh *minimum essential force* dalam menghadapi ancaman non militer ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pertahanan

Anggaran pertahanan merupakan suatu komitmen negara untuk menyediakan sumber dana untuk tujuan-tujuan mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari ancaman militer, apakah fisik (*riil*) atau psikologis (dalam tataran persepsi), internal atau eksternal. Perhatian utama anggaran pertahanan adalah penciptaan, pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata. Tujuan dari pengeluaran pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi negara beserta teritorinya, dan keamanan bagi para warga negaranya (Kennedy, 2017). Chrisnandi (2007) menyebutkan bahwa salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran belanja pertahanan negara. Selain postur dan struktur pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan negara.

Anggaran pertahanan salah satunya digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan, melalui pelaksanaan program-program yang dalam penelitian ini difokuskan pada program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik yang mana dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu (Thoah, 2002).

Menurut Supandi (2020), pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan harus dirumuskan secara jelas agar mendapatkan dampak dan manfaat positif. Hal tersebut dilakukan melalui cara sistematis yang dapat memberikan deskripsi serta mengkondisikan pengembangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik tenaga kerja (SDM) terhadap tugas dan pekerjaannya. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pembinaan sumber daya manusia yang hendak dicapai melalui pendidikan dan pelatihan meliputi:

- a. Peningkatan keahlian kerja.
- b. Pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran, serta perpindahan tenaga kerja.
- c. Pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.
- d. Peningkatan produktivitas kerja.
- e. Peningkatan kecakapan kerja.
- f. Peningkatan rasa tanggungjawab.

Selain pada pembinaan sumber daya manusia, upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan juga dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit. Menurut buku Laporan Capaian Kinerja Deputy Koordinator Bidang Pertahanan Negara Tahun 2017 Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan hal tersebut dilakukan melalui strategi meliputi:

- a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.
- c. Peningkatan fasilitas kesehatan prajurit TNI.

2.2 *Minimum Essential Force* (MEF)

Minimum Essential Force (MEF) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.

Pengadaan alutsista dan pendukung alutsista didasarkan pada pertimbangan ancaman aktual sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2010 kegunaan alutsista untuk tugas operasional yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu: kemampuan, kekuatan, dan gelar untuk mempertahankan negara dari ancaman *flash point* dan terpusat. Program pengadaan pertahanan membutuhkan investasi yang besar, sehingga harus benar-benar berpedoman pada perolehan kematangan teknologi dan produksi yang diproyeksikan mencapai kemandirian alat pertahanan di tahun 2025. Menurut Sahabuddin (2020), kemandirian diciptakan melalui beberapa hal pencapaian indikator yang meliputi:

a. Sumber daya manusia

Dalam hal ini diharapkan mampu mendapatkan *engineer* aktif dalam rancang bangun, pengembangan, dan *upgrading* kelangsungan hidup perusahaan; penguasaan dan peningkatan *engineer* dalam teknologi inti.

b. Teknologi

Teknologi direpresentasikan melalui penguasaan integrasi sistem dan penguasaan integrasi senjata.

c. Produksi

Produksi diharapkan dapat menciptakan penguasaan teknologi *advance* material dan penguasaan proses produksi teknologi tinggi.

2.3 Ancaman Non Militer

Ancaman nirmiliter dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan disebut ancaman non militer merupakan bentuk ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Ancaman non militer dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Ancaman non militer digolongkan ke dalam beberapa dimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi baik pada tataran lokal, regional, maupun nasional (www.kemhan.go.id).

J. Peter Burgess dalam buku *Non-Military Security Challenges* menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang menyangkut dinamika ancaman non militer antara lain: 1) Ketidakmanan yang bersumber dari dinamika hubungan antar individu, 2) Ketidakamanan sosial, 3) Arus perpindahan manusia atau migrasi, 4) Perubahan iklim, 5) Sumber daya alam dan air, 6) Energi, 7) Kejahatan transnasional, 8) Perdagangan manusia, 9) Perdagangan senjata, dan 10) Kesehatan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, para akademisi dan juga pemangku kebijakan dapat menjadikan 1) Komersialisasi keamanan, 2) Penyedia keamanan, 3) Teknologisasi keamanan, 4) Globalisasi keamanan, dan 5) Intensitas berkembangnya "*production of insecurity*" sebagai *center for gravity* dalam melihat penyelesaian masalah-masalah yang diakibatkan oleh ancaman-ancaman nonmiliter (Alfajri *et.al*, 2019).

Gambaran arus globalisasi yang begitu kompleks dan sangat pesat melewati batas-batas tanpa disadari membawa isu-isu strategis yang dapat menimbulkan ancaman non militer. Bentuk ancaman-ancaman non militer di Indonesia yang berpotensi mengganggu kestabilan dan integrasi nasional menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) antara lain ancaman pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman berdimensi legislasi. Pandemi covid-19 merupakan ancaman bidang keselamatan umum tentang penyebaran virus berbahaya. Selain itu, Supandi (2020) mengatakan pandemi covid-19 juga menjadi ancaman nyata bagi sektor ekonomi yang menyebabkan turunya pertumbuhan ekonomi secara tajam.

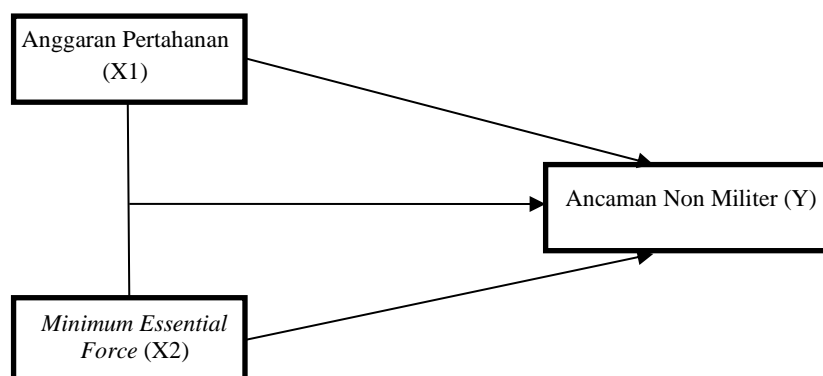
Pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut salah satunya diakibatkan menambah pesatnya jumlah pengangguran pekerja formal maupun informal yang totalnya mencapai 56,7 persen (Indayani dan Hartono, 2020). Meskipun secara khusus tingginya pengangguran disebabkan oleh akibat pandemi covid-19, namun secara umum menurut Ishak (2018) pengangguran disebabkan oleh beberapa hal meliputi:

- a. Sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
- b. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
- c. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
- d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan.

- e. Belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan fasilitasi maupun pelatihan untuk meningkatkan *softskill*.

2.4 Model Analisis

Model analisis digunakan untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik dalam analisis datanya, baik menggunakan variabel terukur maupun variabel laten. Adapun model analisis penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Analisis
Sumber: Diolah Peneliti, (2021).

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan, dimana kebenarannya perlu dibuktikan. (Tanjung dan Devi, 2013). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan anggaran pertahanan dan *minimum essential force* secara simultan dalam menghadapi ancaman non militer.
H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer.
H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan *minimum essential force* dalam menghadapi ancaman non militer.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang di dapat (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakan sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel dianalisis menggunakan teori yang objektif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui metode ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sujarweni, 2015).

3.1 Sampel

Arikunto (2006) menjelaskan apabila jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Sedangkan, jumlah populasi pada penelitian ini kurang dari 100 orang. Oleh karena itu, sampel penelitian ini yang mendapatkan kuesioner penelitian adalah 76 orang.

3.2 Analisis Data

Sugiono (2012) menjelaskan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah

diajukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Kualitas Data

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya sebuah kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dengan menggunakan metode *Pearson's Product Moment Correlation*. Data dapat dikatakan valid ketika r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} dengan membandingkan nilai r_{hitung} terhadap nilai r_{tabel} menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan nilai sig 2-tailed = 0,000. Responden dalam penelitian ini berjumlah 76. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui besaran r_{tabel} adalah 0.2257 ($df=n-2=76-2=74$) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Jadi, dapat dikatakan valid ketika r_{hitung} pada *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0.2257.

Sebelum dilakukan uji selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas instrumen anggaran pertahanan, *minimum essential force*, dan postur Tentara Nasional Indonesia dimana pengujian ini untuk mengetahui valid atau layak tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS V.21, sedangkan hasil uji pengolahan data di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Anggaran Pertahanan

Butir Pernyataan	Corrected Item – Total Correlation
AP.1	0.556
AP.2	0.581
AP.3	0.816
AP.4	0.743
AP.5	0.659
AP.6	0.838
AP.7	0.556
AP.8	0.683
AP.9	0.823
AP.10	0.557
AP.11	0.438
AP.12	0.843
AP.13	0.908
AP.14	0.897
AP.15	0.730
AP.16	0.585
AP.17	0.438
AP.18	0.575

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Tabel di atas menunjukkan nilai semua butir pernyataan kuesioner dari variabel anggaran pertahanan mulai butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 18 dinyatakan valid. Semua butir pernyataan pada tabel di atas mempunyai nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0.2257. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen anggaran pertahanan adalah valid.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen *Minimum Essential Force*

Butir Pernyataan	Corrected Item – Total Correlation
MEF.1	0.635
MEF.2	0.648
MEF.3	0.912
MEF.4	0.811
MEF.5	0.648
MEF.6	0.811

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Tabel di atas menunjukkan nilai semua butir pernyataan kuesioner dari variabel *minimum essential force* mulai butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 6 dinyatakan valid. Semua butir pernyataan pada tabel di atas mempunyai nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0.2257. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen *minimum essential force* adalah valid.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Ancaman Non Militer

Butir Pernyataan	Corrected Item – Total Correlation
ANM.1	0.598
ANM.2	0.498
ANM.3	0.723
ANM.4	0.753
ANM.5	0.598
ANM.6	0.753
ANM.7	0.583
ANM.8	0.547
ANM.9	0.498
ANM.10	0.753

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Tabel di atas menunjukkan nilai semua butir pernyataan kuesioner dari variabel ancaman non militer mulai butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 10 dinyatakan valid. Semua butir pernyataan pada tabel di atas mempunyai nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0.2257. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen ancaman non militer adalah valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* diukur berdasarkan skala *Cronbach's Alpha* 0 sampai 1. Nugroho dan Suyuthi dalam Sujianto (2009) menegaskan bahwa kuesioner dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Alpha Cronbach's* > dari 0.60. Adapun hasil pengujian reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Anggaran Pertahanan	0,942	Reliabel
<i>Minimum Essential Force</i>	0,905	Reliabel
Ancaman Non Militer	0,886	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, (2021).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel anggaran pertahanan, *minimum essential force*, dan ancaman non militer lebih besar dari 0.60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas pada ketiga variabel dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas Data

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Variabel Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,84482060
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,083
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		,942
Asymp. Sig. (2-tailed)		,338
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dilakukan, nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* sebesar 0.338 lebih besar dari signifikansi 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

4.2.2 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0. Kriteria dalam uji linearitas adalah dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Deviation from linearity*) lebih besar dari 0.05. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Linearitas Variabel Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Variabel	Nilai signifikansi <i>Deviation from Linearity</i>	Keterangan
Anggaran Pertahanan	0,308	Linear
<i>Minimum Essential Force</i>	0,199	Linear

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Berdasarkan hasil linearitas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar 0,308 dan 0,199. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara kedua variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang linear, hal ini karena nilai signifikansi lebih besar dibandingkan 0.05.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Terhadap Ancaman Non Militer

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Anggaran Pertahanan	,411	2,433
	Minimum Essential Force	,251	3,988

a. Dependent Variable: Ancaman Non Militer

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

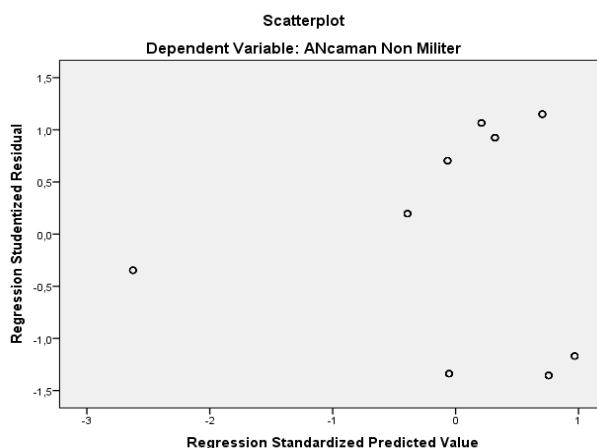
Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan keseluruhan nilai *Tolerance* pada variabel anggaran pertahanan dan *minimum essential force* di atas 0,10 ($> 0,10$). Hasil pengujian multikolinieritas dapat diketahui pula bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk keseluruhan variabel di bawah 10,00 (≤ 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gangguan multikolinearitas.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot model* tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- 1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola .
- 2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- 3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja (Sujianto, 2009).

Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Terhadap Ancaman Non Militer

Sumber: Data diolah peneliti, (2021).

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dalam hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi-asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi dari model ini.

4.3 Uji Regresi Linear Berganda

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan melihat nilai t_{hitung} penelitian, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima, sedangkan apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Besarnya t_{tabel} dihitung dengan melihat Derajat Kebebasan (DK) yaitu $76-2 = 74$ (1,9925), sedangkan untuk taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian ini sebesar 5% (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dalam penelitian ini sebesar 5% atau dengan tingkat kepercayaan

sebesar 95%. Nilai masing-masing koefisien regresi diketahui melalui hasil perhitungan melalui *SPSS Statistic 21.0 For Windows*.

- a. Pengaruh Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* secara simultan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Koefisien determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig. F
0,562	49,101	3,12	0,000 ^b

Sumber : Data diolah peneliti, (2021).

Berdasarkan tabel di atas diketahui angka *Adjusted R square* (r^2) adalah 0,562 sehingga dapat diketahui angka koefisien determinasi sebesar 56,2%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* secara simultan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer adalah 56,2%, sedangkan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan hasil dari Uji F yaitu F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan nilai sebesar 49,101 > 3,12. Selain itu, dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau lebih rendah dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* berpengaruh positif dan signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer.

- b. Pengaruh Anggaran Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh Anggaran Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

B	Std. Error	Beta	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
0,442	0,054	0,688	8,162	1,9925	0,000

Sumber : Data diolah peneliti, (2021).

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 8,162 sedangkan t_{tabel} pada signifikansi 0,05 sebesar 1,9925 sehingga t_{hitung} < t_{tabel} (8,162 < 1,9925). Selain itu, dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan nilai B koefisien sebesar 0,442 (positif). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pertahanan berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer.

- c. Pengaruh *Minimum Essential force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

B	Std. Error	Beta	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
0,508	0,233	0,115	2,183	1,9925	0,032

Sumber : Data diolah peneliti, (2021).

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,183 sedangkan t_{tabel} pada signifikansi 0,05 sebesar 1,9925 sehingga t_{hitung} > t_{tabel} (2,183 > 1,9925). Selain itu, dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan nilai B koefisien sebesar 0,508 (positif). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, disimpulkan bahwa variabel *Minimum Essential Force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer.

d. Sumbangan Efektif Indikator

Sumbangan efektif indikator merupakan ukuran indikator mana yang paling berpengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun sumbangan efektif dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$SE_{Xi} = b_{Xi} \cdot \text{crossproduct} \cdot R^2 / \text{Regression} \quad (1)$$

b_{Xi} = koefisien b komponen x
 cp = crossproduct komponen
 Regression = nilai regresi
 R^2 = sumbangan efektif total

Adapun hasil penghitungan sumbangan efektif indikator variabel anggaran pertahanan dan *minimum essential force* sebagai berikut:

Tabel 4.11 Sumbangan Efektif Indikator

Variabel	Indikator	Sumbangan Efektif	Ket.
Anggaran Pertahanan	AP 15	33,4 %	Paling berpengaruh
	AP 2	32 %	
<i>Minimum Essential Force</i>	MEF 5	31,9 %	Paling berpengaruh
	MEF 3	15 %	

Sumber : Data diolah peneliti, (2021).

Berdasarkan data pada tabel di atas, disimpulkan peningkatan kualitas dan kuantitas latihan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan mental personel TNI sebagai profesional di bidang pertahanan dan peningkatan keahlian dapat meningkatkan motivasi berkarir menjadi indikator paling berpengaruh pada variabel anggaran pertahanan. Sedangkan, penguatan pertahanan diciptakan melalui penguasaan teknologi *advance* material sebagai modal produksi alat pertahanan dan pertahanan yang kuat diciptakan melalui penguasaan integrasi sistem menjadi indikator paling berpengaruh pada variabel *minimum essential force*.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini menguji variabel independen yaitu Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer. Adapun penjelasan pengaruh masing-masing variabel terdapat dibawah ini.

4.4.1 Pengaruh Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* secara simultan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($49,101 > 3,12$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih rendah dari signifikansi normal penelitian 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

4.4.2 Pengaruh Anggaran Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Anggaran Pertahanan berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai B koefisien penelitian yaitu sebesar 0,442 yang menandakan bahwa pengaruh Anggaran Pertahanan Menghadapi Ancaman Non Militer adalah positif dan nilai t_{hitung} sebesar 8,162 lebih besar dari t_{tabel} pada signifikansi 0,05 sebesar 1,9925 ($8,162 > 1,9925$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pertahanan berpengaruh positif dan signifikan Menghadapi Ancaman Non Militer, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

4.4.3 Pengaruh *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan *minimum essential force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai B koefisien penelitian yaitu sebesar 0,508 yang menandakan bahwa pengaruh *Minimum Essential Force* Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer adalah positif dan nilai t_{hitung} sebesar 2,183 lebih besar dari t_{tabel} pada signifikansi 0,05 sebesar 1,9925 ($2,183 > 1,9925$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Minimum Essential Force* berpengaruh positif dan signifikan Menghadapi Ancaman Non Militer, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* secara simultan berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer.
- Anggaran Pertahanan dan *Minimum Essential Force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer
- Minimum Essential Force* berpengaruh positif signifikan Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer

5.2 Saran

- Bagi Kementerian Pertahanan
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka optimalisasi urusan pemerintahan bidang pertahanan.
- Bagi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian serta evaluasi kebijakan anggaran khususnya bidang sumber daya manusia serta bidang alat peralatan pertahanan dan keamanan.
- Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan wawasan dan literasi bidang ilmu pertahanan secara umum.

Bibliografi

- Alfajri, *et. al.* (2019). "Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia". *Jurnal Global Strategis*. Volume 13, No 1, hh 109.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, (2015).
- Chrisnandi, Yuddy. (2007). "The Political Dilemma of Defence Budgeting in Indonesia". *UNISCI Discussion Papers*, No.15.
- Dewan Pertimbangan Presiden RI. (2017). "Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Memperkokoh NKRI". <https://wantimpres.go.id/id/memperkuat-pertahanan-negara-untuk-menghadapi-ancaman-nonmiliter-dalam-rangka-memperkokoh-nkri/>, diakses 17 Desember 2021.
- Indayani, Siti dan Hartono, Budi. (2020). "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. Volume 18, No. 2, hh 207.
- Ishak, Khadijah. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita: IQTISHADUNA*. Volume 7, Nomor 1, hh 26-27.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson *et. al.* (2017). "Manajemen Anggaran Pertahanan Nasional". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS) Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana*. Vol 1, No 1, hh 1.
- Mengko, Diandra Megaputri. (2015). "Problematika Tugas Perbantuan TNI". *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol.I No.2, hh 175.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyeragaman *Minimum Essential Force* Komponen Utama.

- Sahabuddin, Zainal Abidin. (2020). *Buku Ajar Pengadaan Alat Pertahanan dan Logistik*. Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu.
- Sariwaty S, Yulia dan Rahmawati, Dini. (2020). "Covid-19 Fenomena Ancaman keamanan Non-Tradisional Kontemporer". *Jurnal Syntax Transformation*. Volume 1, Nomor 6, hh 294.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujianto, Agus Eko. (2009). *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Supandi. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pertahanan*. Bogor: UNHAN.
- Supandi. (2020). *Model Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PKT) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Dengan Pendekatan Ekonomi Pertahanan*. Bogor: UNHAN.
- Supandi. 2019. *Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Negara*. Bogor: UNHAN.
- Thoha, Miftah. (2002). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- World Health Organisation. (2020). "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". dalam <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses 17 Desember 2021.